

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi politik dalam keadaan bencana membutuhkan strategi yang tepat untuk mencegah datangnya bencana dan mengatasi bencana tersebut saat terjadi. Saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi *Coronavirus Disease* 2019 yang ditetapkan sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa)¹ oleh pemerintah sebab kemunculan virus ini memberi dampak dalam berbagai sektor seperti sektor kesehatan, sosial, ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan lainnya. Keadaan ini bisa dikatakan dalam kondisi genting atau krisis karena terdapat banyak dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid 19 saat ini. Hardjana mengartikan krisis dalam tiga pengertian, yang pertama yaitu berdasarkan sumber kekuatan yang non manusia dan tidak dapat diprediksi; kedua yaitu bahaya yang datang secara berkala; ketiga yaitu serangkaian peristiwa yang tidak terduga.² Dalam tiga pengertian dasar ini pandemi Covid-19 dapat dikategorikan dalam pengertian pertama sebab sumber kekuatannya di luar

¹ KLB (Kejadian Luar Biasa) merupakan status yang ditetapkan pemerintah sebagai peristiwa merebaknya wabah penyakit menular yang diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan RI Nomor 949/MENKES/SK/VII/2004 tentang status Kejadian Luar Biasa. Dalam mengkategorikan sebuah peristiwa sebagai Kejadian Luar Biasa didasarkan pada Keputusan Dirjen Nomor 451/91 menyatakan ada tiga unsur yaitu timbulnya wabah yang tidak ada/ tidak dikenal sebelumnya, terjadi peningkatan kejadian penyakit/kematian dalam 3 kurun waktu secara terus-menerus menurut jenis penyakitnya, dan jumlah penderita baru yang menunjukkan kenaikan dua kali lipat/ lebih dalam satu bulan dibanding rata-rata per bulan sebelumnya.

² Topan Setiawan dkk, 2019, Komunikasi Krisis di Era Digital, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Volume 1 (2): 50-61

kendali manusia dan kedatangan pandemi ini terkesan mendadak tanpa adanya prediksi akan datang.

Maka dalam menghadapi kondisi ini bentuk pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam komunikasi politik tentu berbeda dengan keadaan normal.³ Apabila disesuaikan dengan kondisi saat ini, pemerintah diposisikan sebagai pihak yang bertanggungjawab dengan pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola krisis pandemi saat ini dan juga harus bisa mengkomunikasikan krisis ini dengan perangkat atau lembaga kenegaraan lainnya serta pada masyarakat luas. Dalam krisis kemungkinan adanya ketidakpastian sangat umum terjadi yang menyebabkan sulitnya memperoleh informasi yang pasti, sehingga komunikasi dari pemerintah penting dilakukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang beredar.

Perbedaan komunikasi politik yang dilakukan pemerintah pada keadaan normal dengan keadaan bencana tentu berbeda karena dari segi urgensinya komunikasi politik yang dilakukan dalam keadaan bencana sangat mendesak dan bisa berakibat fatal bila tidak ditangani dengan segera oleh pemerintah. Hal inilah yang menarik peneliti dalam membahas komunikasi politik saat terjadinya bencana seperti yang terjadi saat ini karena diperlukan langkah dalam pendekatan yang strategis untuk menyelesaikan atau meminimalisir dampak yang diakibatkan bencana tersebut.

Saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang tergolong dalam KLB karena penyebaran yang cepat dan terus meluas. Salah satu upaya yang

³ Ibaratnya dalam penanganan atau pengelolaan krisis, seorang dokter tidak hanya dituntut memiliki kecakapan teknis, melainkan terutama mengenai bagaimana mengkomunikasikan tentang penyakit yang dihadapi pasiennya, serta upaya untuk menangani pasien, baik pada pasien, sesama teman sejawat dokter, petugas medis terkait, dan juga keluarga korban.

dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam mencegah penyebaran virus ini adalah melalui kebijakan nasional yaitu kebijakan vaksinasi Covid-19. Program vaksinasi Covid-19 ini menjadi instruksi presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 pada tanggal 5 Oktober 2020. Selain keputusan Perpres pelaksanaan vaksinasi juga didukung oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yang menyebutkan keterlibatan pemerintah daerah pada strategi komunikasi yang dilakukan agar masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam penanganan pandemi ini yang menjadi fokus penelitian.

Terbentuknya kebijakan dan peraturan ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19, salah satu peningkatan kasus konfirmasi tertinggi terjadi pada tanggal 3 Juli 2021 dengan data sebagai berikut:

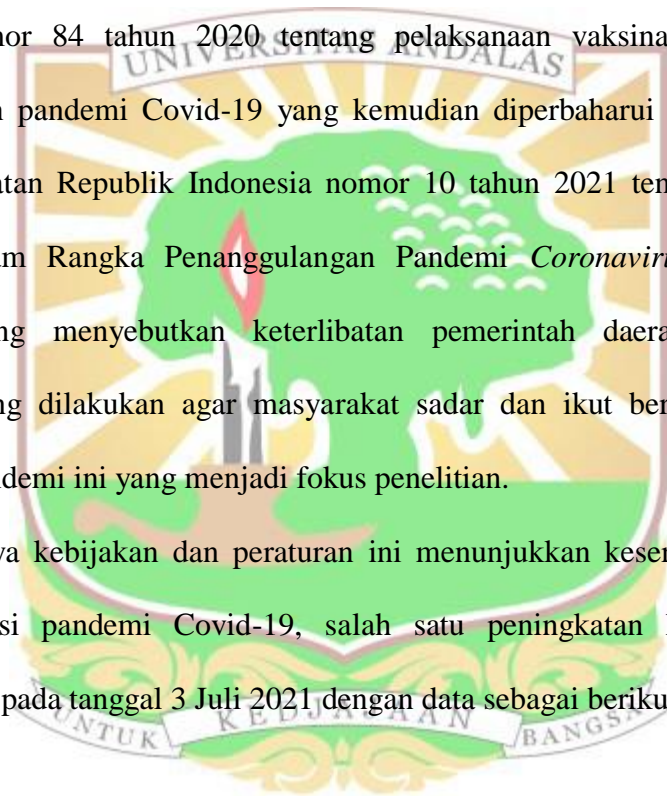


Table 1.1

Update situasi Covid-19 pada tanggal 3 Juli 2021 di Indonesia

Jumlah Kasus	
Kasus Konfirmasi	2.256.851 (dengan kenaikan 27.913)
Kasus sembuh	1.915.147 (dengan kenaikan 13.282)
Kasus meninggal	60.027 (dengan kenaikan 493)
Kasus aktif	138.238

Sumber Sekunder: Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Data Pantau Covid-19 Indonesia, <https://covid19.go.id> diakses pada 22 Januari 2022

Melalui program vaksinasi Covid-19 ini diharapkan agar berkurangnya jumlah kasus positif Covid-19 melalui terwujudnya kekebalan kelompok (*herd immunity*) dengan target yang telah ditentukan dengan jumlah 70 persen dari penduduk (208.265.720 orang) dalam skala nasional hingga Desember 2021 atau awal tahun 2022. Untuk mencapai target ini pemerintah membagi tahap pelaksanaan vaksinasi dengan mempertimbangkan ketersediaan dan waktu kedatangan menjadi 4 tahap yaitu tahap pertama dilaksanakan mulai bulan Januari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang berusia 18 tahun ke atas; tahap kedua dilaksanakan mulai minggu ketiga Februari 2021 dengan sasaran kelompok lanjut usia (≥ 60 tahun) dan petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun,

terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat ditargetkan dan; tahap ketiga dengan sasaran kelompok prioritas masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, yang berusia 18 tahun ke atas dan masyarakat lainnya selain kelompok prioritas yang dilakukan vaksinasi pada tahap I dan tahap II, dilaksanakan mulai bulan Juli 2021.⁴

Berdasarkan data yang didapat pada tanggal 27 September 2021 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), persentase orang yang sudah divaksin pada tahap pertama baru mencapai 41,85 persen (87.162.526 orang) dari target, tahap kedua mencapai 23,49 persen (48.915.476 orang), dan tahap ketiga baru mencapai 4,36 persen (909.407 orang). Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi optimis menyatakan bahwa target 70 persen penduduk Indonesia yang divaksin dapat dicapai akhir tahun ini, selain itu Juru Bicara Pemerintah dalam penanganan kasus Covid-19 sekaligus Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai target WHO yang menargetkan setidaknya 10 persen penduduk tiap negara telah divaksin. Selain itu Indonesia juga termasuk 10 besar negara dengan suntikan vaksin terbanyak di dunia. Reisa menjelaskan prestasi ini bisa dicapai karena pemerintah giat menyediakan stok vaksin dan mendistribusikan ke seluruh daerah, per 24 September 2021 pemerintah

⁴ *Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19*, Edisi Pertama (Mei 2021), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm 13

menerima lebih dari 273,6 juta dosis vaksin baik melalui jalur pembelian langsung, kerja sama *global COVAC Facility*, atau hibah dari negara-negara sahabat.⁵

Meskipun secara nasional jumlah persentase penduduk yang sudah divaksin memenuhi target WHO dan diharapkan akan memenuhi target nasional sebanyak 70 persen hingga akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 mendatang, masih terdapat permasalahan terkait pemerataan program vaksinasi di Indonesia yang bisa menyebabkan usaha mengatasi pandemi ini menjadi endemi. Salah satu faktor penyebab tidak meratanya pelaksanaan program vaksinasi yaitu kurangnya komunikasi dari pemerintah pada masyarakat daerahnya untuk melaksanakan vaksinasi, hal ini sesuai dengan pernyataan Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Widodo Muktiyo dalam sebuah webinar di Universitas Indonesia, peran pemerintah dalam mengkomunikasikan suatu isu atau permasalahan dalam masyarakat agar tidak terbentuknya opini publik yang salah dan sikap tidak percaya pada pemerintah, dalam pernyataan ini peran pemerintah yang dilibatkan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kurangnya komunikasi pemerintah pada masyarakat dapat menyebabkan masyarakat terpengaruh oleh berita palsu yang menimbulkan keraguan terhadap vaksin. Berikut contoh hoaks terkait vaksin yang menyebar di berbagai media sosial dan jumlah hoaks yang beredar di berbagai *platform* berdasarkan data Kominfo:

⁵ CNN Indonesia. Capaian Vaksinasi, Bukti Serius Indonesia Tangani Covid-19 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210925101504-25-699270/capaian-vaksinasi-bukti-serius-indonesia-tangani-covid-19>, diakses pada 28 September 2021



Gambar 1.1

Data Hoaks Covid-19 Hingga 10 Agustus 2020

Oleh sebab itu diperlukan kemampuan mengelola dan menyampaikan informasi pada masyarakat dengan baik dan efektif dari pemerintah perlu dilakukan untuk membentuk masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memilah informasi yang benar serta peka pada urgensi pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Selaras dengan hal ini salah satu aspek penting di dalam komunikasi adalah konsep reduksi ketidakpastian; komunikasi itu sendiri muncul karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, supaya dapat bertindak secara efektif demi melindungi atau memperkuat ego yang bersangkutan dalam berinteraksi secara individual maupun kelompok.⁶ Dalam situasi saat ini komunikasi yang dilakukan pemerintah pada masyarakat sangat menentukan tindakan dan sikap yang diambil masyarakat. Upaya komunikasi yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan dengan efektif bila telah terdapat bentuk kerjasama dan koordinasi yang baik, hal ini nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini dengan menggunakan bentuk

⁶ Eko Harry Susanto, 2013, *Komunikasi Politik Pesan, Kepemimpinan dan Khalayak*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 22

pendekatan komunikasi risiko, pendekatan ini digunakan agar sesuai dengan kondisi saat ini yang menghadapi krisis kesehatan.

Terkait pelaksanaan program vaksinasi Covid-19, peran komunikasi politik pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan melalui pendekatan komunikasi risiko, hal ini sesuai dengan arahan WHO (*World Health Organization*) yang mengembangkan strategi komunikasi risiko untuk menghadapi kondisi wabah penyakit. Pelaksanaan komunikasi politik dengan pendekatan komunikasi risiko dapat dilakukan pada koordinasi dalam pemerintahan sebagai strategi agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dengan risiko-risiko yang ada saat ini dan akan muncul di masa yang akan datang. Komunikasi risiko adalah komunikasi yang tepat agar masyarakat yang berisiko memahami dan mengadopsi perilaku yang benar, juga agar pihak berwenang dan para ahli dapat mendengarkan dan menangani kekhawatiran serta kebutuhan masyarakat secara relevan dan terpercaya.⁷

Penelitian terkait komunikasi oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 sebelumnya pernah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Danang Kurniawan dan Arissy Jorgi Sutan pada tahun 2021 dengan judul “Penggunaan Sosial Media Dalam Menyebarkan Program Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia” dalam tulisan di Jurnal Kebijakan Publik volume 12 nomor 1 yang membahas upaya Pemerintah Indonesia dalam mengumumkan program vaksinasi Covid-19 melalui media sosial *Twitter*.

⁷ *Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan*, 2021, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, hlm 4

Kemudian penelitian terdahulu lainnya yaitu “Komunikasi Politik: Pertarungan Kepentingan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Covid-19” oleh Nadia Febiana dalam tulisan pada Jurnal Translitera volume 10 nomor 2 pada tahun 2021 yang membahas hubungan kerjasama pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal komunikasi politik yang dilakukan secara vertikal yang mengharuskan keselarasan tindakan yang diambil pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan tidak melenceng dari arahan pemerintah pusat.

Terakhir penelitian yang mirip dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh Fadjarini Sulistyowati dan Nina Uswatun Hasanah pada 2021 dalam tulisan di Jurnal Riset Komunikasi volume 4 nomor 2 dengan judul “Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19 pada Majalah TEMPO Edisi Maret-Juli 2020”. Penelitian membahas isu terkait strategi komunikasi publik oleh pemerintah pada masyarakat agar tidak menyebabkan kepanikan dan ketidakpercayaan dari masyarakat yang ditinjau dari penggunaan media. Dalam penelitian ini media yang dibahas adalah media massa yaitu Majalah TEMPO Edisi Maret-Juli 2020.

Berdasarkan tiga contoh penelitian terdahulu yang peneliti rujuk terdapat kebaharuan dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas peran komunikasi politik pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi Covid-19 sebagai bentuk penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai KLB oleh pemerintah. Penelitian ini didasarkan pada konsep teori komunikasi politik dengan pendekatan komunikasi risiko dalam penyebaran informasi untuk melaksanakan program

vaksinasi Covid-19 yang diadakan pemerintah pusat sebagai bentuk pengendalian dampak kerugian yang ditimbulkan krisis pandemi Covid-19. Berdasarkan fenomena ini peneliti memilih Kota Padang, Sumatera Barat sebagai fokus penelitian, sebab peneliti berasumsi bahwa berbagai bentuk komunikasi politik oleh Pemerintah Kota Padang sudah dilakukan namun masih belum menghasilkan upaya yang maksimal dibandingkan daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat yang bisa mencapai target 70% pada dosis pertama dan kedua.

1.2 Rumusan Masalah

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia telah mencapai Sumatera Barat pada tanggal 26 Maret 2020 dengan lima pasien pertama yaitu dua warga Bukittinggi, satu warga Tanah Datar, satu warga Padang, dan satu warga Pesisir Selatan. Perkembangan jumlah kasus positif Covid-19 di Sumatera Barat terus meningkat hingga tanggal 15 Januari 2021, Sumatera Barat menjadi provinsi kedelapan berdasarkan peringkat kasus positif Covid-19 tertinggi di Indonesia dengan total 25.227 orang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 dan besar *positivity rate* 7,58 %.⁸

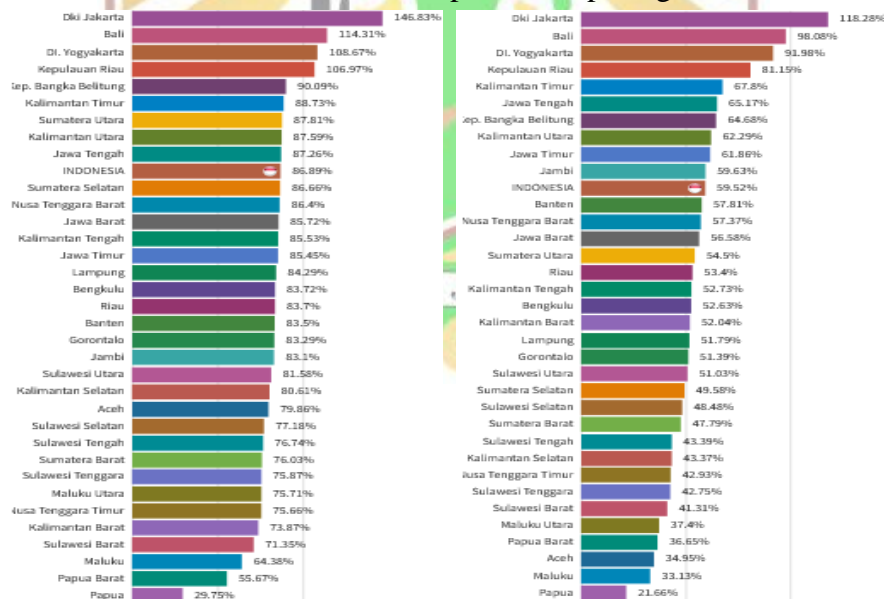
Padahal fenomena Covid-19 di Sumatera Barat sudah ada sejak 26 Maret 2020 yang sudah berdampak pada banyak sektor, suara penolakan dari masyarakat Sumatera Barat ini bisa jadi disebabkan oleh banyak faktor salah satunya yaitu adanya penyebaran hoaks terkait ketidakamanan vaksin Covid-19 seperti mengandung bahan yang tidak halal, menyebabkan kematian, mengandung magnet

⁸ Kominfo Sumatera Barat, Data Pantau *Coronavirus Disease* Provinsi Sumatera Barat, <https://sumbarprov.go.id/> diakses pada 1 Mei 2021

microchip, menyebabkan kemandulan, dan lainnya. Maka untuk mengatasi hal ini perlu adanya komunikasi yang sifatnya edukatif pada masyarakat Sumatera Barat terkait vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah.

Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang tergolong rendah kesadaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan survei *daring* WHO, Kementerian Kesehatan, ITAGI dan UNICEF pada bulan September 2020 bahwa berdasarkan kemauan membayar untuk memperoleh vaksin Covid-19 bervariasi antar provinsi, tingkat kemauan untuk membayar di DKI Jakarta 41% disusul Papua 40% dan Banten 39% sedangkan urutan kemauan membayar terendah tampak di Sumatera Barat dan Gorontalo (masing-masing sebanyak 23%).

Tingkat vaksinasi Covid-19 Sumatera Barat di tingkat nasional berdasarkan *website* resmi Kementerian Kesehatan RI dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2

Urutan tingkat vaksinasi Covid-19 hingga 22 Januari 2022

Pada data di atas terlihat bahwa tingkat vaksinasi Covid-19 di Sumatera Barat pada dosis 1 dan 2 masih di bawah rata-rata yaitu pada dosis pertama Sumatera Barat mencapai 76,03% dan rata-rata di Indonesia yaitu 86,89%, sedangkan pada dosis kedua Sumatera Barat mencapai 47,79% dengan rata-rata di Indonesia yaitu 59,52%. Meskipun pada dosis pertama Sumatera Barat telah mencapai target dengan mendapat persentase yang lebih dari 70%, namun pada dosis kedua masih belum mencapai target provinsi karena belum mencapai minimal 70%.

Dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 terdapat beberapa jenis vaksin yang digunakan oleh pemerintah, yaitu:

Tabel 1.2
Jenis Vaksin Covid-19

Jenis Vaksin Covid-19	Jumlah Dosis	Interval Minimal Pemberian Antar Dosis	Cara Pemberian
Sinovac	2 (0.5 ml per dosis)	28 hari	Intramuskular
Sinopharm	2 (0.5 ml per dosis)	21 hari	Intramuskular
AstraZeneca	2 (0.5 ml per dosis)	12 minggu	Intramuskular
Novavax	2 (0.5 ml per dosis)	21 hari	Intramuskular
Moderna	2 (0.5 ml per dosis)	28 hari	Intramuskular
Pfizer	2 (0.3 ml per dosis)	21-28 hari	Intramuskular
Cansino	1 (0.5 ml per dosis)	-	Intramuskular
Sputnik V	2 (0.5 ml per dosis)	21 hari	Intramuskular

Sumber Sekunder: *Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19*, Edisi Pertama (Mei 2021), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm 15

Berdasarkan data jenis vaksin Covid-19 di atas, total peserta yang sudah divaksin hingga tanggal 22 Januari 2022 dengan dosis pertama sebesar 3.317.821 orang

(75.26%) dan dosis kedua sebesar 2,099,888 orang (47.63%). Berikut uraian data orang yang sudah divaksinasi di Sumatera Barat hingga 22 Januari 2022:

Tabel 1.3

Data orang yang sudah divaksin di Sumatera Barat berdasarkan target vaksinasi Covid-19 hingga 22 Januari 2022

Wilayah	Vaksinasi Dosis 1		Vaksinasi Dosis 2	
	Jumlah orang	Presentase	Jumlah orang	Presentase
Kota Padang	655,266	90.18%	446,072	61.39%
Kab. Dharmasraya	140,873	78.59%	92,583	51.65%
Kab.Lima Puluh Kota	234,367	75.46%	156,276	50.31%
Kab. Tanah Datar	201,604	65.81%	142,134	46.40%
Kota Bukittinggi	108,308	113.16%	66,053	69.01%
Kab. Sijunjung	146,560	79.18%	102,060	55.14%
Kab. Padang Pariaman	179,189	52.30%	104,952	30.64%
Kab. Solok	215,433	69.09%	127,417	40.86%
Kab. Solok Selatan	109,098	75.79%	78,653	54.64%
Kab. Agam	233,064	53.95%	153,159	35.45%
Kab. Pesisir Selatan	285,139	71.27%	184,032	46.00%
Kota Payakumbuh	97,262	88.37%	72,191	65.59%
Kab. Pasaman Barat	253,318	76.06%	128,063	38.45%
Kota Solok	55,794	97.82%	36,754	64.44%
Kota Sawahlunto	53,123	102.54%	38,483	74.28%
Kota Pariaman	70,075	93.89%	31,339	41.99%
Kota Padang Panjang	50,743	115.15%	35,749	81.13%
JUMLAH	3,317,821	75.26%	2,099,888	47.63%

Sumber Sekunder: Kementerian Kesehatan RI <https://vaksin.kemendes.go.id>, diakses pada 27 Oktober 2021

Berdasarkan data di atas, Kota Padang sebagai wilayah yang terbanyak jumlah penduduknya yaitu 909.040 jiwa sudah mencapai target pada dosis pertama namun belum pada dosis kedua. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, upaya komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah di Kota Padang tentu lebih berat karena banyaknya jumlah penduduk yang harus diarahkan agar melakukan program vaksinasi dari pemerintah pusat. Sebab melalui komunikasi yang baik, masyarakat bisa mengetahui informasi, maksud, dan tujuan dari pemerintah serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Dan Nimmo komunikasi dapat berpengaruh dalam membentuk perilaku dan keputusan individu atau kelompok sebab melalui komunikasi mengandung makna, meskipun makna dari pesan komunikasi ini tidak secara langsung mempengaruhi komunikan (penerima informasi/makna) namun makna ini nantinya akan membentuk interpretasi seseorang yang mempengaruhi dan menjadi pertimbangan bagi orang tersebut dalam bertindak dan mengambil keputusan. Meskipun demikian Dan Nimmo juga menjelaskan bahwa faktor-faktor yang membentuk atau mempengaruhi perilaku seseorang bukan hanya berasal dari komunikasi semata saja, namun juga berasal dari faktor lainnya seperti kondisi lingkungan, nilai/moral yang pegang, dan lainnya. Namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada faktor dari komunikasi yang membentuk/mempengaruhi perilaku seseorang dalam melaksanakan program vaksinasi Covid-19 dari pemerintah.

Beberapa upaya komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mendorong masyarakat melakukan vaksinasi melibatkan Wali Kota Padang, Kepolisian, tenaga kesehatan, Humas Kota Padang, Dinas Kesehatan, Dinas

Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan dinas lainnya. Bentuk upaya komunikasi telah dilakukan pemerintah yaitu seperti melakukan sosialisasi di beberapa tempat, membuat jadwal vaksinasi untuk masyarakat, serta mengadakan pertemuan dengan tenaga kesehatan.

Contoh upaya-upaya komunikasi yang dilakukan pemerintah seperti upaya Walikota Padang, Hendri Septa, yang mengadakan pertemuan dengan para dokter vaksinator dan koordinator vaksin dari 24 Puskesmas se-Kota Padang di Palanta Kediaman Resminya pada tanggal 8 Januari 2022.⁹ Pertemuan ini diadakan dengan tujuan agar memaksimalkan upaya vaksinasi Covid-19 di Kota Padang melalui tenaga kesehatan.



Gambar 1.3

Pertemuan Walikota Padang dengan para dokter vaksinator dan koordinator vaksin dari 24 Puskesmas se-Kota Padang pada 8 Januari 2022

⁹ Facebook Humas Kota Padang, https://web.facebook.com/humaskotapadang?_rdc=1&_rdr diakses pada 27 Januari 2022

Upaya komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang lainnya seperti dengan pengadaan sosialisasi oleh dinas terkait, tenaga kesehatan, dan *stakeholder* Pemerintah Kota Padang lainnya. Contohnya seperti perencanaan sosialisasi vaksinasi yang akan diadakan pada tanggal 28 Januari 2022 hingga 30 Januari 2022 oleh Kepala Puskesmas Rawang Kecamatan Padang Selatan, dr Viona Putria, di 14 Sekolah Dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas Rawang secara bertahap. Sosialisasi ini diikuti oleh puluhan orang tua dan wali murid, yang dengan antusias mendengarkan penjelasan tim kesehatan (*vaccinator*) dari Puskesmas Rawang.¹⁰ Sosialisasi ini dilakukan secara edukatif pada masyarakat terutama terkait informasi seputar vaksinasi, hal ini sesuai dengan pernyataan dr Viona Putria bahwa sosialisasi ini bermanfaat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait vaksinasi Covid-19 dan agar tidak mudah percaya dengan berita-berita hoaks yang banyak tersebar dalam tengah masyarakat terutama dari media sosial.



Gambar 1.4

**Sosialisasi vaksinasi Covid-19 oleh Puskesmas Rawang di 14 Sekolah Dasar
di wilayah kerja Puskesmas Rawang tanggal 28-30 Januari 2022**

¹⁰ Info Publik, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/598812/puskesmas-rawang-kota-padang-siap-lakukan-sosialisasi-vaksin-anak> diakses pada 27 Januari 2022

Contoh lainnya dalam upaya Pemerintah Kota Padang untuk mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi yaitu melalui keterlibatan Kapolresta Padang Kombes Politik, Imran Amir, yang menugaskan personel polisi wanita (Polwan) untuk mensosialisasikan vaksinasi Covid-19. Dipimpin Wakapolresta Padang AKBP Yessi Kurniati, para Polwan Polresta Padang mengunjungi Pasar Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung pada 8 Januari 2022.¹¹



Gambar 1.5

**Sosialisasi vaksinasi Covid-19 oleh polisi wanita Polresta Padang
di Pasar Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung pada 8 Januari 2022**

Upaya komunikasi politik yang dilakukan pemerintah juga dilaksanakan melalui saluran media sosial dan massa oleh Humas Kota Padang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang melalui *website* resmi dan media sosial seperti *Instagram*

¹¹ Website Kota Padang, <https://www.padang.go.id/polwan-polresta-padang-sosialisasi-vaksinasi-di-pasar-gaung> diakses pada 27 Januari 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang dan *Facebook* Humas Kota Padang, serta pemberitaan di media massa lainnya seperti salah satunya koran.

Berdasarkan bentuk-bentuk upaya komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengarahkan masyarakat Kota Padang melaksanakan vaksinasi Covid-19 dan data pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa telah ada upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang meskipun begitu peneliti berasumsi bentuk komunikasi politik yang dilakukan Pemerintah Kota Padang masih terdapat kekurangan dalam mencapai target vaksinasi di Kota Padang. Hal ini menunjukkan masih terdapat permasalahan pada komunikasi politik yang dilakukan Pemerintah Kota Padang yang salah satunya terkait dengan koordinasi yang dilakukan antar dinas dan institusi terkait dalam melakukan program vaksinasi Covid 19. Asumsi mengenai koordinasi dalam Pemerintah Kota Padang yang masih kurang ini didasarkan karena koordinasi menjadi faktor pendukung dalam berjalannya komunikasi politik yang efektif. Bila koordinasi yang dilakukan dalam Pemerintah Kota Padang terjalin dengan baik maka kemampuan dalam mengelola dan menyampaikan informasi pada masyarakat Kota Padang juga dapat terlaksana dengan baik.

Maka berdasarkan permasalahan ini, peneliti merumuskan pertanyaan kunci penelitian ini yaitu: Sejauhmana upaya komunikasi politik yang dilakukan antar dinas dan instansi dalam Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah untuk menjelaskan dan menganalisis upaya komunikasi politik yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di Kota Padang antar dinas dan instansi terkait di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Akademis

1. Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi ilmu politik khususnya di bidang komunikasi politik.
2. Sebagai bahan informasi ilmiah penelitian-penelitian yang mengkaji tentang komunikasi politik dalam menghadapi risiko pandemi Covid-19.

1.4.2 Praktis

Dari segi praktis, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sebagai bahan pemikiran ataupun bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Padang terkait upaya melaksanakan program vaksinasi Covid-19.

